

Dr. H. Jawade Hafidz Arsyad, S.H., M.H.
Dian Karisma, S.H., M.H.

SENTRALISASI BIROKRASI

**PENGADAAN BARANG &
JASA PEMERINTAH**

Daftar Isi

PRAKATA	v
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xiii
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Akar Permasalahan	17
C. Kerangka Teori	20
 BAB 2 LANDASAN TEORI	 40
A. Reformasi Birokrasi	40
1. Pengertian Reformasi dan Birokrasi	40
2. Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	44
3. Ciri Birokrasi	48
4. Konsep dan Teori Birokrasi	48
5. Manajemen Birokrasi	50
B. Kebijakan Hukum Birokrasi	54
1. Pengertian Kebijakan Hukum Birokrasi.....	54
2. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Hukum Birokrasi	63
3. Hubungan Hukum Birokrasi dan Kebijakan Publik	67

4. Pembentukan Hukum dan Formulasi Kebijakan Hukum Birokrasi	69
5. Penerapan Hukum Birokrasi dan Kebijakan Publik	84
C. Keuangan Negara	88
1. Pengertian Keuangan Negara	88
2. Ruang Lingkup Keuangan Negara.....	103
3. Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Negara	105
4. Historisasi Pengaturan Keuangan Negara	106
D. Pengadaan Barang dan Jasa	109
1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa	109
2. Aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa	112
3. Para Pihak Terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa	118
4. Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa.....	119
E. Tindak Pidana Korupsi	122
1. Definisi Korupsi	122
2. Tipologi Korupsi.....	131
3. Modus Operandi Korupsi dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.....	136

BAB 3 PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI INDONESIA	142
A. Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	142
B. Tahapan dan Modus Penyimpangan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	158
C. Akibat Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	230
1. Munculnya Tindak Pidana Korupsi	231
2. Munculnya Pelanggaran Administrasi dalam Barang/ Jasa	237
3. Munculnya Tindak Pidana Administrasi	278

BAB 4	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERLUNYA	
	SENTRALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	
	PEMERINTAH	287
A.	Alasan Substansi: Kelemahan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah jo. Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	287
B.	Alasan Struktur: Kelemahan Struktur Birokrasi Peng- adaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Berpotensi Menimbulkan Korupsi	329
C.	Alasan Budaya: Lemahnya Integritas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	349
 BAB 5	 MODEL SENTRALISASI BIROKRASI PENGADAAN	
	BARANG DAN JASA PEMERINTAH	394
A.	Model Ideal Sentralisasi Kebijakan Substansi Hukum ...	394
1.	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	402
2.	Penguatan Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Ke- uangan Negara	410
B.	Model Ideal Sentralisasi Kebijakan Struktur Hukum...	419
1.	Debirokratisasi dan Restrukturisasi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	419
2.	Pengaturan Kewenangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa	426
3.	Pembentukan Badan/Lembaga Khusus Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	435
C.	Model Ideal Sentralisasi Kebijakan Budaya Hukum.....	449
1.	Penguatan Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/jasa	449

2. Pengaturan Sistem Pertanggungjawaban Pengadaan Barang/Jasa	454
3. Upaya Pencegahan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa	464
4. Penguatan Fungsi Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa	467
D. Perbandingan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Negara Lain	481
BAB 6 PENUTUP	493
DAFTAR PUSTAKA	497
PROFIL PENULIS	517